



Ekonomi Kelas XII

APBN, APBD, dan PERPAJAKAN

Dibuat Oleh: Fina Melani/012

 **LIVEWORKSHEETS**

1. Pengertian APBN

Anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berisi daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).



Anggaran APBN menurut Pasal 12 Undang-Undang nomor 1/2004 mengenai Pembendaharaan Negara meliputi:

- a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan.
- b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan.
- c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik anggaran yang bersangkutan maupun berikutnya.

2. Fungsi APBN berdasarkan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 pasal 3

Otorisasi

Dasar pelaksanaan pendapatan & belanja.

Perencanaan

Pedoman pengelolaan keuangan.

Pengawasan

Pedoman untuk menilai suatu kegiatan pemerintahan.

Alokasi

Membiayai kebutuhan publik.

Distribusi

Pemerataan pendapatan.

Stabilisasi

Menjaga stabilitas ekonomi.

3. Tujuan APBN

- > Mendorong pertumbuhan ekonomi
- > Menciptakan pemerataan pendapatan
- > Menjaga stabilitas ekonomi
- > Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4. Sumber Penerimaan Negara



> Pajak

- Pajak Penghasilan (PPH)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Cukai

> Penerimaan negara bukan pajak

- Hasil BUMN
- Pemanfaatan SDA
- Denda
- Pinjaman dalam & luar negeri.

> Hibah.

- Individu
- Institusi
- Pemerintah dalam atau luar negeri

5. Jenis-Jenis Belanja Negara

Pengeluaran negara dibedakan menjadi dua kelompok:

1. Kelompok Belanja
2. Kelompok Pengeluaran Biaya

Belanja negara fokus pada belanja:

Subsidi & bantuan sosial.
Transfer ke daerah & dana desa.
Infrastruktur & layanan publik.

Belanja Negara dibagi menjadi dua:

- a. Belanja pemerintah pusat
- b. Belanja pemerintah daerah



6. Mekanisme Penyusunan APBN

Mekanisme penyusunan APBN merujuk pada Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 . APBN disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Serta penyusunan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah tahunan (RKP).

7. Pengaruh APBN terhadap Perekonomian

Pengaruh APBN terhadap Perekonomian akan sejalan dengan fungsi APBN yaitu sebagai instrumen kebijakan fiskal. Melalui APBN pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal yang bertujuan menjaga stabilitas dan perkembangan perekonomian negara, mendorong investasi dan mengatur tingkat harga.

1. Pengertian APBD

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang tertuang dalam APBD akan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Permendagri Nomer 13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan wadah menampung berbagai kegiatan dan program yang pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Tahun anggaran APBD meliputi satu tahun.

2. Tujuan APBD



- Meningkatkan pembangunan dan sarana dan prasarana daerah yang efisien, efektif, kompetitif, dan terjangkau
- Mewujudkan pembangunan daerah yang adil, ramah lingkungan dan berbasis peran serta masyarakat.
- Menciptakan rasa aman dan adanya penegakan keadilan.
- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- memperluas lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan. Bertujuan memberikan dana pada pelaksanaan otonomi suatu daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi, keuntungan dari pengelolaan BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah
- **Dana perimbangan:** Dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah, meliputi bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- **Lain-lain pendapatan daerah yang sah:** Pendapatan daerah selain dari pendapatan asli daerah dan perimbangan, seperti dana darurat, hibah, sumber lainnya sesuai peraturan undang-undang.

4. Belanja Pemerintah Daerah



Menurut PP Nomer 58 Tahun 2005, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Menurut Undang-Undang nomer 33 tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah dibagi menjadi empat:

- a. Belanja operasional
- b. Belanja modal
- c. Belanja tidak terduga
- d. Belanja transfer

Pengertian Jenis Belanja Daerah

Belanja Operasional

Belanja sehari-hari yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Contohnya belanja pegawai, bunga dan subsidi.

Belanja Modal

Pengeluaran untuk menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun.

Belanja Tidak Terduga

Belanja untuk keadaan darurat maupun musibah.

Belanja Transfer

Pengeluaran pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.



5. Mekanisme Penyusunan APBD



- a. Pemerintah daerah membuat perencanaan APBD (RAPBD).
- b. RAPBD akan disusulkan kepada DPRD. Apabila DPRD setuju, RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Namun sebaliknya, apabila DPRD tidak setuju pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran sebesar APBD tahun sebelumnya.
- c. Pelaksanaan APBD yang telah disetujui dan ditetapkan DPRD melalui peraturan daerah akan dituangkan melalui keputusan gubernur/walikota.



6. Pengaruh APBD terhadap Perekonomian

APBD sebagai kebijakan fiskal berpengaruh pada perekonomian melalui Alokasi dan Distribusi Anggaran pemerintah daerah.

- Menstabilkan perekonomian
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Pemerataan pendapatan masyarakat

Pertanyaan

1. Berikut beberapa fungsi APBN, kecuali...

2. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan...